

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"> - Bawa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah dan juga sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018. - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang, Pajak Daerah; Retribusi Daerah; peninjauan tarif retribusi; pemungutan pajak dan retribusi; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/ retribusi; pemberian fasilitas pajak dan retribusi; kerahasiaan data wajib pajak; insentif pemungutan pajak dan retribusi; penyidikan; sanksi administratif; ketentuan pidana.
CATATAN:	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Januari 2024. - Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Penjelasan: 15 hlm.

